

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai apakah penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja dapat mewujudkan hak tenaga kerja atas kehidupan yang layak, bagaimanakah peranan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten Rembang dan apa Hambatan untuk mewujudkan hak tenaga kerja atas kehidupan yang layak, Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rembang dalam mengatasi hambatan yang ditemui pada penetapan upah minimum Kabupaten Rembang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan tersebut belum memenuhi Kebutuhan Hidup Layak bagi Buruh di Kabupaten Rembang mengingat besarnya biaya hidup sehari-hari di Rembang. Kendala yang dihadapi oleh Dinsosnaker dalam menjalankan perannya dalam pelaksanaan kebijakan upah minimum antara lain: Pengaturan tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak diatur secara persektor dari jenis usaha yang dijalankan; kurangnya respon dari perusahaan untuk mentaati peraturan yang ada, bahwa di Kabupaten Rembang masih banyak terdapat perusahaan yang kurang merespon atau tidak menaati peraturan terkait ketenagakerjaan; Iklim investasi di Kabupaten Rembang masih belum stabil, dan Masih rendahnya daya beli masyarakat. Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Rembang senantiasa berusaha menciptakan komunikasi yang baik dan menjembatani perbedaan pemahaman antara pekerja dan pengusaha. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk menjaga iklim usaha di Kabupaten Rembang. Pekerja dan Pengusaha diberikan pemahaman yang sama bahwa iklim usaha yang baik akan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja serta semakin tumbuhnya perekonomian masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli Masyarakat Rembang..

Kesimpulan yang diperoleh bahwa Upah Minimum Kabupaten Rembang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak di Rembang karena ditentukan berdasarkan kehidupan layak seorang bujangan. Dalam proses pengusulan Upah Minimum Kabupaten Rembang terdapat beberapa kendala yang ditemui oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Rembang diantaranya Upah yang tidak diatur berdasar sektor jenis usaha, rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ada, iklim investasi yang masih belum stabil serta masih rendahnya daya beli masyarakat di Rembang.

***Kata Kunci : Upah Minimum, Kebutuhan Hidup Layak, Tenaga Kerja***

## ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze whether the determination of Minimum Wage Workers can realize the labor rights on a decent life, how the role of Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang in Minimum Wage Determination and what the obstacles to realizing the labor rights to be adequate the standard of living and to know how the policy of Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang to encountered the obstacles in the minimum wage workers determination.

The method used in this research is empirical juridical approach. The specifications research in legal writing is descriptive analytical.

The results showed that the district minimum wage stipulation is not fulfilling the living needs for labor in Rembang due to the enormous costs of daily life in Rembang. The constraints faced by Dinsosnaker in carrying out its role in the implementation of the minimum wage policy, among others: The arrangement of the Minimum Wages District (UMK) is not regulated sectorally of the type of business carried on; the lack of response from the company to comply with the existing regulations, that in Rembang there are still many companies are less responsive or do not comply with rules regarding labor; The investment climate in Rembang still not stable, and still low purchasing power. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang always tries to create good communication and bridge the gap of understanding between workers and employers. This is done with the intention to keep the business climate in Rembang. Workers and employers are given the same understanding that good business climate that will encourage job creation as well as the growing economy of the community, which in turn can increase the purchasing power.

The conclusion is that the Rembang Minimum Wages Workers is not able to meet the needs of a decent life in Rembang as it determined by a single decent life. In the process of the nomination of the Rembang Minimum Wages Workers there are several obstacles encountered by the Dewan Pengupahan Kabupaten Rembang such wages are not set based sectors of business, lack of adherence to existing regulations, investment climate is still not stable and still low purchasing power in Rembang.

Keywords: Minimum Wage Workers, Living Needs, Workforce